



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI IV DPR RI  
DENGAN  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Kalimantan Tengah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu/5 Februari 2020
Waktu	: Pukul 10.40-13.01 WIB
Tempat	: Ruang rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
Acara	: Membahas Perkebunan Kelapa Sawit
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV) DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: .. dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian:

**1. Fraksi PDI Perjuangan**

6 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
3. Drs. I Made Urip, M.Si.
4. Ir. Effendi Sianipar
5. H. Yadi Srimulyadi
6. Ir. Mindo Sianipar

**2. Fraksi Partai Golkar**

6 Dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Firman Soebayo, S.E., M.H.

4. Ichsan Firdaus
5. Budhy Setiawan
6. Alien Mus

**3. Fraksi Partai Gerindra**

4 dari 6 orang Anggota

1. Ir. Endor Hermono, M.B.A.
2. Ir. Sumail Abdullah
3. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
4. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

**4. Fraksi Partai NasDem**

2 dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan/Wakil Ketua
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A
4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
5. Drs. H. Ibnu Multazam.

**6. Fraksi Partai Demokrat**

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'aeni, S.Sos, M.Si.
4. Muslim, S.HI., M.M.

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. H. Johan Rosihan, S.T.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional**

2 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. Slamet Ariyadi, S.Psi.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

- dari 2 orang Anggota

**B. Undangan:**

Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran.

**JALANNYA RAPAT:****KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,  
Yang terhormat saudara Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran,  
Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara-acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus pada tanggal 15 Desember 2019 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI pada tanggal 15 Januari 2020. Pada hari ini Rabu, 5 Februari 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka membahas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI, Anggota yang hadir baru 16 orang dari 54 Anggota, terdiri dari 6 Fraksi. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 Peraturan Tata Tertib, hari ini rapat kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB)

Akan tetapi karena belum kuorum, atas persetujuan Anggota maka kita skors 5 menit setelah kita buka kembali.

Terima kasih.

(RAPAT DISKORS)

Rapat Dengar Pendapat hari ini kita mulau pukul 10.40 WIB dan diakhiri pada pukul 16.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Tatib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan saudara Gubernur Kalimantan Tengah terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Gubernur Kalimantan Tengah;
5. Kesimpulan rapat.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan ekologis sosial dan ekonomis, serta menjaga keterlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan yang generasi yang akan datang.

Saat ini terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Kerusakan hutan terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa ijin dan perkebunan tanpa ijin yang telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang menjadi isu nasional dan isu internasional.

Beberapa waktu lalu terakhir banyak terjadi bencana, seperti banjir, erosi, tanah longgor serta pemanasan global yang banyak diisukan dunia internasional. Sangat banyak kerugian negara akibat bencana ini, hal ini baru merupakan kasus yang berkaitan dengan alam, belum lagi maraknya konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan terkait dengan alih fungsi lahan yang tidak jelas. Konflik ini terjadi kebanyakan mengorbankan masyarakat kecil, bukan hanya harta bahkan nyawa pun dikorbankan.

Kemarin teman-teman Komisi IV DPR RI sudah saya kirimkan berita perusahaan merusak rumah rakyat miskin yang sengketa dengan perusahaan. Mana nanti kita anjurkan, kita sidak, kita kunjungan spesifik, kita atur jadwalnya segera nanti. Itu kalau tidak salah di Jambi, saya juga sudah telepon langsung Ketua DPRD Jambi untuk menyelidiki permasalahan tersebut.

Masalah yang paling penting dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah perambahan hutan untuk penggunaan non kehutanan, seperti perkebunan dan pertambangan yang justru dilakukan oleh perusahaan korporasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Komisi IV DPR RI banyak mendapat data dan info bahwa pelaku perambah kerusakan hutan sebagian besar adalah perusahaan pendatang dari luar dari tersebut. Maroritas perambahan lahan hutan secara besar-besaran adalah spikulan lahan dan mafia bisnis sawit. Dan ini hanya sebagian kecil perambah yang benar-benar miskin dengan jumlah penguasaan lahan atau sekedar upah buruh pada spikulan. Perambahan dan pembakaran kawasan hutan berdampak langsung kepada kehidupan dan mata pencaharian penduduk asli. Di sisi lain, ekosistem hutan juga semakin rusak dan sejumlah tumbuhan satwa liar di lindungi hilang kian terdesak dari habitatnya. Contohnya, perusahaan itu harus menjaga ekosistem jangan nanti

Orang Hutannya dimatiin tidak bertanggungjawab. Di beberapa wilayah satwa yang dilindungi justru banyak mati di perusahaan-perusahaan, ini harus menjadi perhatian kepala daerah, karena ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapi menjadi tanggung jawab kita semua.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Berdasarkan data dari berbagai sumber yang di dapat, bahwa terdapat tumpang tindih areal kawasan hutan, kegiatan kebun dan tambang seluas 10 juta hektar. Rinciannya tumpang tindih kebun mencapai 3,5 juta hektar, tumpang tindih dengan lahan tambang seluas 3,5 juta hektar, sisanya tumpang tindih dengan APL.

Sebagian besar penggunaan kawasan hutan yang tumpang tindih terjadi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, terluas berada di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menindaklanjuti hasil kunjungan kerja spesifik. Komisi IV DPR RI pada tanggal 25 sampai 27 Oktober 2016 terkait ijin usaha perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah serta kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Juli 2018. Terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti oleh saudara Gubernur Kalimantan Tengah.

Untuk itu, dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat hari ini Komisi IV DPR RI meminta penjelasan dari sudara Gubernur atas tindaklanjut yang telah dilakukan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan masalah perambahan kawasan hutan serta adanya indikasi kebun ilegal di Provinsi Kalimantan Tengah. Waktu itu, diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat yang lalu saudara Gubernur akan menyerahkan data ke Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 30 hari, tetapi sampai hari ini data tersebut belum ada. Ini apakah ketidakmampuan Dinas Kehutanan inventarisasinya, atau tidak ada niat.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan saudara Gubernur Kalimantan Tengah untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut diatas.

Silakan Bapak Gubernur.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,  
Shalom,

*Om swasti astu.*

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI, dan Wakil Pimpinan Komisi IV DPR RI dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, Rekan-rekan wartawan media cetak dan media elektronik.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur di hari yang penuh berkah ini yang mana hari ini saya selaku Gubernur Kalimantan Tengah, *alhamdulillah* kami bisa Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. *alhamdulillah* Bapak-bapak semuanya kami yang datang, Bapak-bapak yang hadir disini dalam keadaan sehat wal'afiat semuanya di Komisi IV DPR RI.

Ada beberapa hal yang kami sampaikan, Kalimantan Tengah ini luasnya satu kali setengah pulau Jawa. Dan setelah Papua yang nanti akan dibagi menjadi 3 provinsi, Papua Selatan. Nanti Provinsi Kalimantan Tengah ini terluas dari 34 Provinsi, yaitu dengan luasan gambar umum tentang Kalimantan Tengah batas utara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, batas timur dari Kalimantan Tengah itu Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Batas selatan Laut Jawa serta batas barat itu Kalimantan Barat dengan luas wilayah 153.564 kilo meter persegi. Jumlah penduduk menurut data BPS tahun 2019 ini berada di angka 2.000.700 jiwa lebih.

Kalau dijumlahkan dengan para pendatang yang ada di kebun-kebun kemungkinan jumlah penduduk di Kalimantan Tengah berada di angka 3 juta. Kepadatan penduduk 17 jiwa per kilo meter persegi. Untuk suku di Kalimantan Tengah pertama itu Suku Dayak, Suku Jawa, Banjar, Suku Melayu, Madura, Sunda, Bugis, Batak, Flores, Bali dan suku-suku lainnya. Kami di Kalimantan Tengah dan filosofi, yaitu rumah betang, rumah panjang, rumah adat, yang mana artinya hidup bersama rukun damai dalam satu tempat. Yang mana disitu terdiri dari 3 agama yang paling besar, yaitu agama Islam, agama Kristen dan agama Kaharingan.

Nah, disini juga perlu kami sampaikan langsung ke masalah inti perkebunan yang mana kita rapatkan. Yang mana sesuai dengan undangan Rapat Dengar Pendapat dari Komisi IV DPR RI, sebaran perkebunan di Kalimantan Tengah disini total ada yang belum beroperasi dan operasional. Total ada 326 unit di mulai dari perlu saya sampaikan, sebelum saya sampaikan ini ada berapa luas kebun di Kalimantan Tengah.

Saya jadi Gubernur Kalimantan Tengah di tahun 2016, kami ijin perkebunan ini sebetulnya itu ijin yang diberikan oleh Bupati, Walikota se-Kalimantan Tengah. Sedangkan Gubernur itu tidak mempunyai hak untuk memberikan ijin perkebunan. Disini sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah luas itu berada di 2 juta hektar lebih. Untuk kelapa sawit berada di 1.000.464 hektar lebih, yang kedua didominasi oleh karet, yaitu ada 445 hektar.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Gubernur, ini bahannya tidak dibagikan kepada Anggota?

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Belum.

**KETUA RAPAT:**

Padahal ini sudah lama loh Pak, kami jadwalkan Pak. Coba Sekretariat di *copy* dulu.

Lanjut Pak.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Mohon ijin kami lanjutkan Bapak Pimpinan Rapat.

Yang kedua karet, itu berada 445 ribu hektar lebih, terus yang ketiga kelapa dalam ada 34 ribu hektar lebih. Yang keempat kakao itu di Kalimantan Tengah juga ada Kakao itu ada 2.300 hektar lebih. Terus yang kelima kopi itu ada 1.900 hektar lebih. Dan yang lainnya ada 56 ribu hektar.

Luas perkebunan kelapa sawit, kita produksi CPO itu diperkirakan berada di angka 8.000.800 ton di Kalimantan Tengah. Kita ada perkebunan rakyat juga di Kalimantan Tengah itu berada 166.996 hektar untuk perkebunan sawit. Mendapat dari produksi TBS berada di 4.776.708 ton TBS. perkebunan swasta itu berada di angka 1.298.526 hektar. Untuk produksi TBS itu berada di angka 37.158.504 ton TBS. Kontribusi Kalteng dalam produksi CPO nasional berada di angka 25,3%.

TBS Kelapa Sawit itu berada 310 unit di lintas kabupaten kota ada 23 unit, kabupaten kota ada 287 unit. TBS kelapa sawit ada 310 unit, kami terangkan ada 2.996.518 hektar. TBS kelapa sawit operasional berada 182 unit yang operasional, yaitu sekitar 1.730.970 hektar. TBS yang PMA 36 unit dengan jumlah 551.991 hektar. TBS yang PMDN itu berada 146 unit dengan jumlah 1.178.978 hektar. TBS yang belum operasional berada di angka 128 unit dengan jumlah 1.265.547 hektar. Ini mungkin tidak perlu kami bacakan tapi bisa dilihat disini Bapak Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Perlu kami sampaikan disini TBS PMA ini rata-rata itu tidak ada plasma, hampir tidak ada plasma. Jumlah TBS kelapa sawit yang memiliki PKH, jumlah TBS itu ada 19 unit luas PKH 112.475 hektar. TBS kelapa sawit yang memiliki HGO jumlah TBS ada 118 unit luas HGU ada syarat 1.100.582 hektar.

Disini juga kami tambahkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, menurut saya data ini belum valid total Pak, karena antara Bupati karena Bupati-bupati yang mengeluarkan ijin, Gubernur itu tidak punya hak,

Cuma kami monitor. Kebun di Kalteng itu saya rasa mungkin ada 2 juta hektaran Pak, menurut data-data yang kami dapatkan dari teman-teman LSM. Yang kami anggap ilegal itu....

**KETUA RAPAT:**

Saudara Gubernur, saya bingung tadi penjelasan saudara mengatakan kok dari LSM. Terus buat apa ada Dinas disana, kalau tidam punya data. Bagaimana mau dilanjutkan rapat begini, kalau data LSM siapa yang harus bertanggungjawab valid atau tidak valid ini. Coba saudara Kepala Dinas jawab, kasih kesempatan mengenai tadi kata-kata tadi.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Mungkin mohon ijin Bapak Pimpinan, saya sampaikan mungkin kalau disini Dinas Perkebunan yang menjawab, ini Dinas Kehutanan.

**KETUA RAPAT:**

Dijawab dulu, jadi datanya tidak ada di Provinsi? Kalau tadi saudara Gubernur mengatakan datanya dari LSM berarti di Dinas Perkebunan itu tidak ada data.

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN KALIMANTAN TENGAH:**

Mohon ijin Bapak Gubernur.

Jadi yang dimaksud oleh Bapak Gubernur ini mungkin data kita punya Pak, yang laporan dari PBS-PBS dari kabupaten-kabupaten. Tapi kadang-kadang LSM ini punya data, tapi yang kita pegang sekarang itu adalah data laporan dari Bupati dan Perusahaan, itu mungkin. Karena LSM ini juga bisa kirim data, tapi itu tidak kita gunakan, perkiraan kita.

**KETUA RAPAT:**

Jadi data ini masih perkiraan belum pasti, tidak punya data yang valid? Kasihan sekali Bapak Gubernur ini orang baik Pak. Kalau punya seperti Bapak ini mau jadi apa Kalimantan Tengah. Coba kita lihat kalau tadi datanya saja tidak valid masih mungkin dari LSM, *masya Allah*.

Ya, dilanjutkan dulu, silakan.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Jadi Bapak Pimpinan, ini saya sampaikan secara real, kalau saya tutupi juga bisa Pak, waktu rapat kayak begini. Tapi saya ingin menyampaikan data yang sesungguhnya tetapi menurut saya ini masih belum valid dari Bupati-bupati, karena Bupati-bupati yang memberikan ijin. Kami mengumpulkan data inipun tidak gampang karena kami juga didukung oleh data-data dari luar, kami lihat dilapangan yang terjadi ya memang data ini

saya masih meragukan. Biar pun Kepala Dinas Perkebunan mempunyai data ini tetapi saya masih meragukan.

Lanjut, realisasi pembangunan kebun masyarakat dan plasma oleh TBS, operasional komoditi kelapa sakit di Provinsi Kalimantan Tengah, TBS sudah memiliki kebun plasma sekitar 115 unit. PMA itu 28 unit luas 18 ribu hektar. PMDN berada di 87 unit luas 191 ribu hektar. Ini data-data begini pun saya sampaikan juga dengan Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, ini juga belum saya masih meragukan Pak, ini juga minta dukungan dari Pimpinan Komisi IV dan Wakil Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, untuk menolong kami merapikan perkebunan yang ada di wilayah kami di Kalimantan Tengah. Karena kami melihat semestinya dengan jumlah penduduk Kalimantan Tengah itu tidak ada penduduk yang miskin di Kalimantan Tengah.

Lanjut, dasar hukum dan prosedur perijinan usaha perkebunan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengolahan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.

Lanjut, kewenangan pemberian ijin pengolahan usaha perkebunan. Surat tanda daftar usaha perkebunan budidaya, dan surat tanda daftar usaha perkebunan pengolahan diberikan oleh Bupati, Walikota. Lahan kurang lebih dari 25 hektar. Ijin usaha perkebunan untuk budidaya atau ijin usaha perkebunan untuk pengolahan yang lokasi areal budidaya dan sumber bahan bakunya berada dalam satu wilayah kabupaten kota diberikan oleh Bupati, Walikota. Dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi konstituen dengan rencana makro pembangunan perkebunan dari gubernur.

Ijin usaha perkebunan untuk budidaya atau ijin usaha untuk pengolahan yang areal lokasi budidaya sumber bahan bakunya berada pada lintas kabupaten diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi konstituen dan tata ruang dari Bupati, Walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota sesuai dengan Permentan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan Pasal 19 huruf B.

Lanjut, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perkebunan Permentan Nomor 39 Tahun 2013 Pasal 44. Satu, pembinaan dan pengawasna terhadap pelaksanaan perijinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Gubernur dan Bupati, Walikota sesuai kewenangan. Kedua, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 tahun sekali terhadap pemberian ijin dan pelaksanaan usaha perkebunan. Ketiga, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati, Walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.

Lanjut, hambatan dan tantangan perkembangan korporasi perusahaan di wilayah Kalimantan Tengah. Satu, permasalahan rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Dua, belum fokusnya Pemerintah Kabupaten Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perkebunan di masing-masing kabupaten kota. Tiga, regulasi Pemerintah yang cenderung berubah-ubah, kurang memperhatikan perkembangan aspirasi daerah. Keempat, kebijakan sectoral yang saling bertentangan khususnya dalam pemanfaatan kawasan. Kelima, gangguan usaha dan konflik perkebunan disebabkan oleh masalah lahan dan tuntutan masyarakat terhadap pembangunan kebun untuk masyarakat. Keenam, banyak perkebunan besar yang belum operasional.

Lanjut, solusi perlu revisi Perda 5 Tahun 2015 tentang *Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mengacu kepada Permenhut Nomor 5 Tahun 2012. Dan mengusulkan untuk APL seluas kurang lebih 46% dan kawasan hutan 54%. Pemerintah kabupaten kota agar fokus dalam pelaksanaan....*

#### **KETUA RAPAT:**

Bapak Gubernur, kalau bicara persen inikan Anggota pun tidak paham. Coba ada tidak Anggota yang paham? Permenhut nomor 5 Tahun 2012 mengusulkan untuk APL seluas 46% dan kawasan hutan 54%, kira-kira Anggota ada yang paham tidak? Dari mana dasarnya ini, luasannya berapa 46% equivalen sekian, inikan yang tidak benar ini Sekda sama Kepala Dinasnya. Harusnya Gubernurnya dijelaskan 46% itu luasannya sekian puluh ribu Pak. Coba ada tidak Anggota yang ngerti? Bapak Sugianto Sabran ini adik saya, dulu periode 2009-2014 jadi Anggota Komisi IV DPR RI. Cuma tidak didukung dengan kinerja ini bagaimana. Coba berapa?

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Ijin Pimpinan, nanti kami lengkapi dengan data.

Sebetulnya ini ada data mereka, tapi kayaknya ini dibuat yang baru Pak Pimpinan, tetapi dimanapun tidak ada anak buah yang salah, yang salah Gubernur Bapak Pimpinan.

Pemerintah Kabupaten Kota agar fokus dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melalui ketersediaan anggaran agar kebijakan Pemerintah konsisten dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang harmonis dan sinergis antar sectoral. Pemberian ijin harus melibatkan semua stake holder, Pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Gubernur telah mengusulkan pencabutan ijin kebun yang belum operasional apabila ijin alokasinya melebihi batas waktu ketentuan yang ditetapkan.

Kami ada mengirim surat Bapak Pimpinan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Kami ada mengusulkan ijin untuk dicabut itu ada 1.000.72 hektar. Karena dulu ijin-ijin kebun ini berada di angka kalau tidak salah laporan dari Dinas Perkebunan

kami berada di angka 3 juta lebih. Kami ada usulkan untuk pencabutan 1.000.072 hektar yang lainnya mati dengan sendirinya Bapak Pimpinan. Nanti kami mencoba nanti coba Bapak Kadishut supaya memberikan data yang jelas nanti kepada Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI.

**F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

Interupsi Pimpinan, sebentar Pimpinan.

Berkaitan dengan yang disampaikan Bapak Gubernur, barangkali kami, saya utamanya....

**KETUA RAPAT:**

Belum saya silakan Pak.

**F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):**

Terima kasih yang baik hati yang mulia.

Bapak Gubernur dan jajaran, saya mendengar apa yang disampaikan tadi bahwa ada beberapa perusahaan besar. Jadi menurut saya tidak hanya besar, kecil pun kalau misalnya tidak ada progress terhadap pekerjaan lahan itu saya kira patut untuk dicabut. Namun demikian, kami ingin mendapatkan gambaran ketentuan-ketentuan apa sebenarnya sambil berjalan inikan, sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan ijin itu tidak memenuhi ketentuan dalam pengertian tahapan-tahapan apa yang mereka lakukan lalai dan kemudian dicabut.

Terima kasih.

**GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Terima kasih Pak, atas saran dan masukannya Pak, akan kami perhatikan, nanti akan kami jawab.

Bapak Pimpinan, beberapa hal ini yang kami sampaikan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Pimpinan dan Wakil Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI kami mencoba untuk memberikan jawaban. Dan nanti masalah yang 30 hari nanti biar Dinas kami yang menjawab. Karena kami juga memohon dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk mendukung kami di

Kalimantan Tengah. Bukan Cuma di bidang perkebunan juga tetapi masalah-masalah lain pun, masalah sosial juga banyak sekali di perkebunan ini yang mana kalau menurut data kami ketika kami Kunker kelapangan bahwa masih banyak perkebunan-perkebunan yang masih tidak menjalankan kewajibannya.

Dengan jumlah penduduk Kalimantan Tengah 2.000.700 jiwa itu semestinya tidak ada penduduk yang miskin di Kalimantan Tengah. Tetapi karena ini tidak dijalankan plasmanya, maka dari itu masih banyak penduduk-penduduk yang miskin di Kalimantan Tengah di sekitar kebun, maupun di sekitar hutan.

Mungkin sebelum saya nanti mengakhiri ini, perlu saya sampaikan juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Kami juga ingin berencana mengajukan usul untuk moratorium HPH Pak, karena HPH ini kembali apa yang disampaikan. HPH ini tidak ada kontribusi yang jelas dari tahun 1970, dari jaman Orde Baru dimana jaman Orde Baru, orang Malaysia, orang Korea, orang Singapura yang mempunyai HPH di Kalimantan Tengah sampai di jaman reformasi ini tidak ada kontribusinya kepada masyarakat. Maka dari itu mohon nanti kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI bisa menolong kami untuk supaya seluruh industry-industry yang ada itu tidak lagi di luar Kalimantan Tengah tetapi berada di Kalimantan Tengah.

Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI.

Hal-hal ini yang dapat kami sampaikan dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan nanti kami berusaha untuk menjawab.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufik Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Salom, om swastiastu*

#### **KETUA RAPAT:**

Dalam kesimpulan rapat yang lalu saudara Gubernur, hari Senin, 23 Juli 2018 Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberikan data, peta, informasi terkait perusahaan perambah hutan (kebun dan tambang) dalam daftar kesatuan pengelolaan hutan KPH di Kalimantan Tengah selambat-lambatnya 30 hari. Ini sudah hampir 3 tahun dari 2018 sampai sekarang data tersebut tidak ada. Terus apa yang mau kita bahas kalau datanya saja tidak diserahkan kepada kita. seharusnya kan sudah diingatkan dari awal, bahwa data yang indikasi kebun dan tambang ilegal. Inia da loh tandatangannya, keputusan rapat tanggal 23 Juli 2018. Yang hadir saudara H. Sugianto Sabran Gubernur Kalimantan Tengah, saudara Sri Suwanto Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, kemudian termasuk H. Suwanto Sekretaris Pribadi Gubernur Kalimantan Tengah.

Sampai hari ini datanya belum ada, apa yang mau kita bahas ini. Saya juga bingung, kalau data yang ini dikasih ilegal tidak ada apa yang mau dibahas. Waktu itu pertemuan kita terakhir di hotel, saudara Gubernur mengatakan 850 ribu hektar kebun ilegal.

Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan, selanjutnya kami persilakan Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 257, Anggota silakan tapi ada pembatasan. Yang pertama Bapak Firman Soebagyo senior saya.

Silakan Pak.

**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan Rapat yang saya hormati,  
Saudara Gubernur beserta jajarannya dan Anggota Komisi IV DPR RI yang berbahagia.

Pertama, tentunya kami ya boleh dibilang kalau saya bilang kecewa, Bapak Pimpinan Rapat sudah berkali-kali mengatakan kekecewaan. Namun, tentunya kita berikan satu apresiasi atas kehadiran Bapak Gubernur pada pagi hari ini.

Pertama, Bapak Gubernur ini sebetulnya adalah sangat paham terhadap masalah posisi Kalimantan Tengah karena beliau juga di tahun 2009 bersama-sama kami di Komisi IV DPR RI ini. Masalah Kalimantan Tengah ini Pimpinan, Bapak dan Ibu sekalian persoalan ini nyaris tidak pernah bisa diselesaikan. Saya masih ingat ketika itu saya jadi Pimpinan Komisi IV DPR RI dan saya selaku Ketua Panja, ketika itu Gubernur seluruh jajarannya penuh ruangan ini menyampaikan usulan tata ruang dan kemudian didukung oleh aparaturnya semuanya, ruangan ini sangat penuh. Dan kemudian setelah Komisi IV DPR RI mempertimbangkan pentingnya tata ruang ini segera diselesaikan karena memang Komisi IV DPR RI ketika itu melihat bahwa ada ketidak beresan tentang pemanfaatan hutan atau kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Namun, disayangkan ketika Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah sudah menyepakati dan kemudian Gubernur ketika itu berbondong-bondong lagi bukan Pak Gianto Gubenurnya, Gubernur yang sebelumnya berbondong-bondong lagi bersama-sama apatur untuk minta dibatalkan. Disini ada sebuah pertanyaan kenapa? Justru tata ruang itu adalah menentukan nasibnya Pemerintah Provinsi karena ketika itu banyaknya wilayah-wilayah kantor Pemerintahan bahkan Kepolisian dan sebagainya itu adalah masuk wilayah kawasan hutan. Tapi kenapa justru sudah disetujui malah dibatalkan kembali. Artinya, ada pertanyaan besar kenapa ini dibatalkan, apakah ada hal-hal yang mungkin terselubung dalam persoalan ini.

Yang kedua, mengenai tata ruang ini mungkin Bapak Gubernur tadi telah disampaikan kepada kami minta dukungan untuk segera diselesaikan. Kemudian untuk pengelolaan wilayah Kalimantan Tengah ini rujukan dasarnya apa kalau tata ruang itu tidak ada. Karena tata ruang daerah itu adalah mengacu kepada tata ruang nasional, tata ruang nasional kemudian tata ruang provinsi, baru tata ruang daerah. Nah, ini yang sering terjadi sehingga aturan-aturan ini banyak yang tidak digunakan. Apakah Menteri Kehutanan atau KLHK juga sudah mengeluarkan keputusan tersendiri tanpa persetujuan DJPLS yang menjadi kewenangan DPR RI. Ini kami juga mohon mendapatkan satu informasi supaya nanti kami bisa mengontrol terhadap kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah ini melanggar aturan atau tidak.

Yang kedua, juga yang terkait dengan masalah L.O.I Norwegia. Objek daripada Lol salah satu adalah Kalimantan Tengah. Sampai seberapa jauh manfaat daripada Lol ini untuk Pemerintah Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, ada kontribusi yang jumlahnya tidak sedikit sekitar 1 miliar Dolar. Waktu itu Bapak Wakil Gubernur PLT Ketika itu staf Gubernur pernah mengajukan untuk mencairkan dana ini untuk melakukan reboisasi, tapi ternyata ditolak oleh Pemerintah Pusat badan yang mengelola dana dari Lol ini. Nah, kalau memang tidak ada azas manfaatnya tentunya Bapak Gubernur harus menyampaikan. Dan kalau perlu Bapak Gubernur juga protes kepada Pemerintah Pusat, kalau memang anggaran itu sudah dikucurkan punya hak daripada Kalimantan Tengah itu untuk memanfaatkan dana ini untuk reboisasi.

Dan yang ketiga, yang terkait dengan masalah peristiwa yang menimpa daripada saudara-saudara kita suku anak dalam. Kemarin kami mendapat dari teman-teman WA Group tentang masalah peristiwa penggusuran dan kemudian juga yang semena-mena, oh Jambi itu ya mohon maaf. Nah, kalau itu saya ini mengenai HPH dan HTI Pak, ini mohon juga apakah disana HPH dan HTI juga tambah. Tadi yang disampaikan oleh Pimpinan, apakah ini juga perlu dilaporkan kepada kami karena kami mau memonitor bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Nah, ini tentunya menjadi tugas fungsi ini untuk melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi. Insya allah karena kemarin kami rapat dengan eselon I, itu sudah kami sampaikan juga kami minta data yang sama.

Tujuan Bapak Pimpinan tadi meminta data adalah untuk mensinkronkan apakah data yang dilaporkan daerah dengan pusat ini sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti kan ada sesuatu di tengah jalan ini. Nah, inilah tugas kami bagi DPR RI untuk menelusuri ketidak pastian ini. Ini yang kami sampaikan dan mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa menjelaskan terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah tata ruang dan kemudian Lol juga pelaku usaha lainnya.

Yang terakhir Pak, ini adalah mengenai perkelapa sawitan. Kami juga banyak memonitor bahwa pelanggaran di Kalimantan juga cukup banyak, HTI juga cukup banyak dan ini penting datanya Pak Kepala Dinas untuk diberikan kepada kami. Karena sawit ini yang jelas adalah bisa memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat lokal. Dan kemudian aspek sosialnya juga bisa

menjaga keseimbangan atau kesenjangan sosial antara Jawa dan luar Jawa. Dan kemudian kemudian sawit juga merupakan penggali devisa negara dan penerimaan negara. Tetapi apakah dengan adanya sawit ini ada manfaatnya tidak untuk daerah. Kalau belum ada manfaatnya Pak, kami pernah menginisiasi membuat Rancangan Undang-Undang perlindungan terhadap kelapa sawit tetapi bukan untuk melindungi pengusaha tetapi untuk menetapkan kewajiban-kewajiban apa yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk kepentingan daerah maupun untuk pusat juga untuk masyarakat inti plasma. Plasma inikan sampai sekarang inikan para pelaku usaha juga semasanya sendiri, ada yang dilaksanakan, ada yang tidak, padahal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang, ini menjadi satu kewajiban.

Saya rasa ini yang perlu Bapak sampaikan kepada kami, sehingga kami nanti akan bisa mengevaluasi terhadap berbagai persoalan sehingga kami akan mampu untuk membantu menyelesaikan persoalan Bapak di Kalimantan Tengah ini karena tanpa adanya data yang akurat kami akan sulit untuk membantu persoalan di Kalimantan Tengah ini.

Demikian, terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Firman.

Selanjutnya Bapak Azikin, silakan Pak.

**F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Saudara Gubernur beserta rombongan yang saya hormati.

Bapak Gubernur saya kaget tadi waktu Bapak Gubernur mengatakan ijin perkebunan dikeluarkan oleh Bupati. Ya, lantas Bapak Gubernur tidak bisa memberikan data. Seorang Gubernur mempunyai dua hal yang melekat pada dirinya, wakil Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah. Tugas umum Pemerintahan melekat pada diri Bapak dan tugas Pemerintahan umum juga melekat pada diri Bapak. Sehingga walaupun Kepala Daerah atau Bupati mengeluarkan surat ijin perkebunan, secara otomatis dia memberikan tembusan kepada Bapak terhadap jumlah dan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala daerah di Kabupaten. Dan saya tidak menyalahkan Bapak Gubernur, saya hanya menyesalkan Kepala Dinas Teknis yang menangani ini kalau dia tidak bisa menyajikan data di forum yang terhormat ini.

Yang kedua Bapak Gubernur, saya juga ingin mempertanyakan dan saya yakin pasti Kepala Dinas memahami. Berapa jumlah ijin usaha yang ilegal yang ada di Provinsi Bapak. Kalau Kepala Dinas yang menangani

secara teknis tidak memahami masalah ini berarti dia tidak melaksanakan tugasnya secara optimal.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Azikin.

Ini kritik membangun, bukannya marah akan tetapi kritik membangun, karena setahu saya kalau luasannya lebih dari 25 hektar atau mencakup 2 kabupaten itu ijinnya ada di Provinsi.

Selanjutnya Mbah Muhtarom, Mbah *monggo*, setelah itu Bapak Made Urip.

**F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang saya hormati Bapak Gubernur dan rombongan dari Kalimantan Tengah.

Lansung saja Bapak, saya membaca kesimpulan yang telah dilaksanakan pada Senin, 23 Juli 2018. Di sana ada kesepakatan untuk menyampaikan data-data dan saat ini ternyata belum bisa menyediakan data. Seijin Ketua, kalau memang ini tidak ada yang perlu dibahas saya pikir seperti apa yang dilakukan kepada Kementerian yang lain ya kita *cancel*. Percuma saja kalau kita ini membahas sesuatu yang tidak ada datanya dan tidak jelas. Dan saya tidak bisa banyak ngomong karena saya bagian dari *new comer*, jadi mau bercerita ya cerita apa. Pada prinsip substansinya adalah penyediaan data dan data tidak ada, ya seperti apa yang telah kita lakukan kepada kementerian yang lain. Kalau memang tidak layak untuk dibahas ya rapat kita *cancel*.

Terima kasih Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Mohon maaf Mbah, mungkin Bapak Gubernurnya sibuk karena wilayahnya luas sekali dan tidak didukung optimal.

**F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):**

Mohon maaf Bapak Ketua.

Tadi Bapak Gubernur datang ini ya sekedar memenuhi kewajiban yang selama 3 tahun dirasa tidak pantas, begitu saja.

Mohon maaf, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya Mbah, nanti gini saja data belum data nanti kita undang lagi bawa data. Karena ongkos dari Kalimantan Tengah ke Jakarta cukup mahal Mbah, kalau sampai tidak hasil pulang kan kasihan. *Eman-eman* lah uangnya biar dijelaskan dulu saja.

Selanjutnya Bapak Made Urip, silakan.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Bapak Gubernur dan Kepala Dinas, Sekda yang hadir yang saya hormati.

Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur, ini sudah ada itikad baik untuk menghadiri pertemuan kita di Komisi IV DPR RI ini. Dan juga langkah-langkah strategis yang sudah diambil oleh Bapak Gubernur tentang penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah tata ruang di Kalimantan Tengah. Memang kita pahami bahwa Kalimantan Tengah ini kan cukup luas, yang lahannya dan hutannya di atas jutaan lebih. Jadi perlu kita pahami bersama.

Nah, langkah Bapak Gubernur yang berkaitan dengan masalah pabrik misalnya yang tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat itu sudah dilakukan pencabutan demikian juga lahan-lahan hampir 1 juta lebih sudah dicabut yang tidak memenuhi prosedur. Nah, ini sebuah langkah yang sangat strategis dilakukan oleh Bapak Gubernur kita berikan apresiasi terhadap kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini.

Dan beliau sebagai Anggota Komisi IV DPR RI dulu, mantan Anggota Komisi IV DPR RI, tentu paham apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Komisi IV DPR RI. Tadi teman-teman sudah banyak menyampaikan tentang data misalnya, barangkali ini perlu dilengkapi Bapak Gubernur lebih konkrit, lebih *real* dan kemudian juga memang betul-betul kenyataan dilapangan seperti apa yang diungkap nanti.

Nah, barangkali pertemuan ini ya tidak terlalu lengkap ya kalau tidak didukung oleh data-data. Jadi saya senada dengan apa yang disampaikan Mbak Muhtarom misalnya, barangkali kita lakukan pertemuan lagi supaya betul-betul pertemuan kita lebih komprehensif berapa sih sebetulnya yang lahan-lahan itu milik rakyat, kemudian milik pengusaha, kemudian yang tidak memenuhi prosedur, berapa kebun, berapa tembangnya misalnya. Ini

barangkali perlu dilengkapi Bapak Gubernur pada pertemuan yang akan datang.

Tetapi, Saya punya data-data ini Bapak Gubernur, ada teman yang menyampaikan tentang perkebunan misalnya. Ada sekitar 282 unit yang tidak memenuhi syarat prosedur yang telah dilalui, hampir itu 3 jutaan lebih kebun itu tidak memenuhi syarat. Demikian juga tambang hampir sekitar 629 unit yang tidak memenuhi prosedur, tidak melalui persyaratan, jadi hampir 3 juta lebih. Ini dikatakan sudah melalui hasil investigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Kehutanan, Bareskrim, kemudian lingkungan hidup, Mendagri, demikian juga input-input dari LSM. Barangkali ini perlu nanti dilengkapi data-data ini, apa betul atau tidak Bapak Gubernur. Jadi barangkali perlu disampaikan nanti kalau misalnya ada waktu lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jadi jelas susah kita mengambil kesimpulan kalau tidak ada data yang benar, nanti keputusan ngambang mengawang-awang nanti, hanya sebuah fatamorgana, kemudian kita acari entah dimana. Jadi ibarat kita lari ya dibayang-bayang ya tidak bisa kita tangkap dia. Maka itu, data-data ini menjadi amat penting, kita ngomong harus dengan data. Nah, itu Bapak Gubernur dan Bapak Ketua.

Nah, tentang flora dan fauna barangkali ini perlu juga nanti disampaikan oleh Bapak Gubernur, misalnya bagaimana penangkaran orang utan yang dulu misalnya kita lihat pernah disana waktu kunjungan kerja, apa masih ada atau tidak disana. barangkali ini karena kekayaan alam kita yang perlu kita sampaikan juga. barangkali Bapak Gubernur di Komisi IV DPR RI ini. Tentang kontribusi misalnya yang sudah berjalan, baik tambang maupun juga kebun perlu disampaikan kepada kita disini di Komisi IV DPR RI.

Jadi barangkali itu Bapak Pimpinan, jelas ini harus di-*follow up* lagi dengan pertemuan selanjutnya karena data barangkali masih di awang-awang ini semuanya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Made Urip.

Slamet kamu jangan main handphone saja kamu, kamu belajar sini, kami Anggota baru.

Selanjutnya Mbak Alien Mus.

#### **F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajarannya.

Mohon maaf Bapak Gubernur, saya merasa kehadiran Bapak disini hanya memenuhi panggilan Komisi IV DPR RI tanpa didasari dengan niat baik yang dimintakan oleh Komisi IV DPR RI sebelumnya. Data yang diminta selama 3 tahun yang belum ada pun, sekarang tetap juga tidak ada dan terkesannya data-data ini ditutupi-tutupi oleh Pemerintah Kalimantan Tengah dan menjadi rancu juga bagi kami ada apakah ini sebenarnya.

Sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak sangat berkewajiban penuh atas segala sesuatu tentang kawasan hutan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang Bapak. Data-data yang Bapak berikan juga belum bisa dipastikan. Terus tadi dalam pemaparan Bapak, Bapak meminta juga 1 juta lebih 20 hektar untuk Kementan usulan pencabutan ijin. Hal seperti itu bisa Bapak sampaikan, tapi hal-hal yang sangat prinsip tidak bisa Bapak sampaikan kepada kami sebagai Komisi IV DPR RI.

Terus juga kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan P3H Pasal 28 Huruf E dan G “melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas”, berarti pelanggaran juga bagi pejabat yang sudah ditentukan oleh Bapak Presiden. Kelalaian tersebut Pak.

Kami berharap Bapak Gubernur sangat serius untuk bisa menangani kasus tersebut. Kami juga mendapatkan video yang sangat luar biasa, terharu kami melihat hal tersebut bagaimana ada posko-posko yang terjadi seperti itu Pak, apa Bapak ketahui atau tidak juga ini, apa perlu dihadirkan juga ini data-datanya. Posko darurat masyarakat suku anak dalam dan petani korban penggusuran yang dilakukan oleh sekeruti dan karyawan, Jambi ya, maaf. Ini saya salah lagi Pak.

**KETUA RAPAT:**

Itu data yang kemarin saya kirim, itu dapat dari Ketua DPRD Provinsi Jambi. Untuk menjadi perhatian saya tembuskan juga kepada Kementerian Kehutanan dan Dirjen Perkebunan.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Maaf, salah baca.

**KETUA RAPAT:**

Lain kali kalau ngomong dibaca dulu yang jelas.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Jadi fotonya terlalu banyak Pak, karena gabungan Pak, kalau saya cari ada 9000 foto dari semua Provinsi. Jadi mohon maaf Pak, itu salah baca.

Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, bahwa setiap orang dilarang merusak atau memindahkan atau menghilangkan tapal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan atau batas kawasan hutan yang berhimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan atau luasan kawasan hutan. 26, 27, 28, tolong Bapak baca, ada ya nanti saya sampaikan. Tolong Pak, ini tugas dan tanggungjawab wewenang Bapak dan Bapak saya harapkan setiap kali datang kesini walaupun Bapak mengakui Kadis Kehutananya atau Sekdanya adalah kesalahan semua ada dilimpahkan kepada Bapak, tapi setidaknya dalam memberikan representasi atau presentasi kepada Komisi IV DPR RI harus diberikan kevalidan data agar kita juga mau memperjuangkan atau membahas satu masalah di tempat Bapak juga sesuai dengan data-data yang kita inginkan dan sesuai hasil penelitian. Data BPS juga ada, di Kehutanannya juga pasti ada, mintalah data tersebut jangan pakai data-data dari LSM.

Terima kasih, itu saja tolong ditindaklanjuti.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Mbak ini dari Fraksi mana Mbak?

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Saya dari Fraksi yang seberang Bapak Pimpinan.

Fraksi Komisi IV DPR RI Pak.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Bapak Guntur, silakan.

**F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):**

Terima kasih Ketua.

Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota Komisi IV DPR RI dan juga Bapak Gubernur.

Menindaklanjuti daripada pembicara terdahulu dan juga dari Bapak sendiri tadi menyampaikan. Pertama, bahwa HPH ini sejak Orde Baru sampai dengan sekarang belum memberikan kontribusi yang riil kepada masyarakat. Yang kedua, dari tata ruang yang saya simak juga belum terpenuhi. Yang ketiga, yang sudah banyak terjadi juga banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Yang keempat, juga terjadi penggusuran yang menurut saya juga kurang pada proporsinya.

Semuanya ini menurut saya adalah melekat pada tanggungjawab Bapak sepenuhnya sebagai Gubernur. Saya kira hal-hal yang seperti ini kalau

memang ada niat yang betul-betul baik pada porsi Bapak sebagai Gubernur, tidak sulit untuk menyampaikan data-data sehingga sekarang waktu ini bisa efisien untuk kita bicarakan.

Saran saya Ketua, supaya tidak mengolor-ngolor waktu yang akan datang. Pada saat ini disampaikan kapan kita bisa ketemu Gubernur, sehingga waktunya akan efisien untuk kembali lengkap bicara yang lebih lengkap.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Guntur.

Selanjutnya Bapak Ansi Lema dari Fraksi PDI Perjuangan.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Selamat pagi buat kita semua.

Bapak Gubernur yang terhormat dan para jajarannya.

Terima kasih sudah hadir disini.

Saya mencatat Kalteng ini adalah salah satu daerah penghasil sawit terbesar di tanah air Pak. Dan kalau kita lihat disana itu yang melakukan usaha sawit itu adalah korporasi-korporasi besar, dan konglomerat-konglomerat besar Pak. Data saya walaupun ini mungkin harus juga dibuktikan oleh Bapak juga, ada sekira 1,7 juta lebih Pak, bahkan Kalimantan Timur kalah Pak. Yang ingin saya tanyakan, pertama ada kesan bahwa monopoli perusahaan besar dan konglomerat besar itu kemudian membuat relasi yang kerap kali tidak seimbang dengan petani Pak. Saya ingin tanya kira-kira bagaimana Bapak sebagai Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dalam hal ini juga memberikan perhatian kepada para petani kita.

Yang kedua, terkait dengan kebijakan B20 dan B30 berkali-kali Presiden Jokowi itu berjanji akan membuat aftur, green full, dari sawit dan program bio diesel akan ditingkatkan menjadi B100, kira-kira seperti itu Pak. Nah, sekarang sudah menjadi B30. Namun, informasi yang saya dapatkan Pak, tidak setets pun bio diesel sawit yang dikelola oleh Pertamina dan industry nio diesel peroleh dari kebun-kebun petani sawit, tidak satu pun. Nah, ini bagaimana keberpihakan Bapak terhadap hal ini, sehingga kemudian jangan sampai petani itu terus menerus hanya dihisap Pak, oleh korporasi-korporasi besar dan negara itu terkesan diam dan takluk.

Yang berikutnya soal data, mohon maaf Pak, bukan main-main Pak, data ini harus valid dan akurat. Karena kalau tidak valid dan akurat kita akan

tersesar. Saya kira ini beberapa point yang bisa saya sampaikan. dipertemuan selanjutnya saya berharap sudah ada data yang akurat dan valid, karena kebijakan tanpa data ini ibarat kita jalan tetapi tidak tahu tujuan Pak. Untung sekarang sudah ada google map Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sudah jangan salaman, duduk cepat, nanti salamannya.

Selanjutnya Mbak Wulan, silakan.

**F-NASDEM (Hj. SRI WULAN, S.E.);**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan, rekan-rekan dan juga Bapak Gubernur dan jajarannya yang saya hormati.

Jadi mendengar ini semuanya jadi terkesan lucu ya, kemarin sudah ada rapat Komisi IV DPR RI sudah meminta kepada Gubernur untuk memberikan data dan peta, tapi ternyata Bapak Gubernur datang tidak bawa itu. Jadi aneh sebenarnya kita mau bahas apa sebenarnya kalau misalnya begitu. Karena apa? inikan jadi acuan kita juga, jadi supaya nanti jadi sinkron.

Tadi setuju dengan juga pendapat rekan terdahulu, jadi kalau misalnya tidak komplit tidak usah kita bahas. Bukan masalah Bapak Gubernur datang jauh juga tidak, harusnya juga kalau datang jauh Bapak Gubernur sudah prepare terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misalnya hanya untuk meminta data dan peta ini dan juga informasi yang terkait perusahaan perambah kawasan hutan ini bisa saja kan sebenarnya Bapak Gubernur telepon, kemudian diemail, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak perlu juga harus pulang lagi atau apa, jadi tolong ini benar-benar diperhatikan sebelum datang kesini. Jadi sebelumnya itu apa yang mau kita bahas.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Mbak Wulan.

Selanjutnya Bapak Dedi.

**WAKIL KETUA/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Sampurasun.*

Bapak Gubernur yang saya hormati dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerahnya,  
Bapak Ketua, para Anggota Komisi IV DPR RI.

Yang pertama, kita cukup mengucapkan rasa syukur dan rasa bangga bahwa ada alumni Komisi IV DPR RI yang sudah jadi Gubernur dan kemudian memimpin daerah yang persis dengan bidangnya di Komisi IV DPR RI. Modal awal ini bisa menjadi modal strategis untuk membangun kesejahteraan publik yang berbasis alam. Yang pertama adalah ketika saya tadi ketemu saya bertanya ada berapa orang Dayak Asli, dimana tinggalnya, bagaimana kehidupannya. Itu saya selalu bertanya itu, kemudian agamanya pasti Kaharingan.

Proses perubahan pada sebuah wilayah dari alam yang begitu belantara dirubah menjadi areal perkebunan, areal pertambangan. Pada niat awalnya pasti memiliki niat untuk membangun kesejahteraan publik masyarakat sekitar. Dengan jumlah penduduk yang sangat kecil hanya 2,6 juta lebih jiwa, Purwakarta sudah 1 juta, Kerawang 2 juta, Bekasi 3 juta, Bogor 6 juta. Nah, dengan tingkat, menurut saya tingkat pendapatannya pasti sangat tinggi, karena disitu ada pertambangan, kemudian disitu ada perkebunan. Yang kita tahu bahwa di sawit saja triliunan.

Nah, yang pertama adalah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bapak mendesain tingkat pendapatan daerah, baik provinsi maupun daerah kabupaten kota peruntukan belanjanya untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya yang jumlahnya sangat kecil itu. Nah, pemahaman membangun kesejahteraan pada masyarakat yang sedikit itu jangan selalu dalam mainset kita itu adalah membangun infrastruktur ke daerah tertinggal, menurut saya bukan itu. Karena apa? pembangunan infrastruktur ke daerah yang sangat sedikit itu bisa jadi bukan malah mensejahterakan akan tetapi malah menyengsarakan. Karena apa? ketika infrastrukturnya dibuka pada daerah itu, dia dulu penduduknya hanya sekitar 3000, 4000, 5000, justru mereka menjadi kehilangan arealnya yang terjadi. Kehilangan hutannya, kehilangan tempat mata pencariannya bahkan kehilangan kehidupannya. Bahkan kalau di Jambi mungkin barangkali kehilangan tempat tinggal sekalian, jadi habis semua.

Nah, untuk itu harus ada desain yang memadai kawasan mana yang memang harus betul-betul dilindungi, tidak apa-apa orang tradisional dengan pengajaran agama Keharingan jangan dianggap dia itu miskin dan tertinggal. Bisa jadi dia itu justru makmur dengan cara hidupnya seperti itu, tetap punya ladang, tetap punya kawasan hutan, cara hidup sejahteranya kan sederhana. Dia tidak butuh nonton, dia tidak butuh rekreasi, dia tidak butuh kendaraan. Nah, dalam konsepsi ini saya harapkan mereka tetap dilindungi, karena itu warga asli Bapak, leluhur Bapak. Saya katakan, saya merinding kalau ngomong begini, leluhur Bapak yang harus dilindungi, karena nasib seperti ini banyak dialami orang Indian di Amerika, orang Aborigin di Australia.

Nah, jangankan pada kawasan yang hutan belantara di Jawa Barat saja yang orang-orangnya mengalami pendidikan relative baik, ketika

industrialisasi ya memang terpinggirkan dan tidak menikmati pada akhirnya. Kenapa? Karena faktor salah pemahaman kita tentang urban. Saya tidak mau misalnya Jawa Barat sudah mengalami problem tentang urban seperti ini, kemudian Kalimantan jangan menghadapi hal yang sama.

Dalam proses ini, seringkali masyarakat lokal seperti saya berkunjung dulu ke Pulang Pisau itu yang terjadi adalah hal yang sangat terbalik. Kalau pengusaha mudah mendapatkan akses dengan puluhan ribu hektar, ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar tetapi masyarakat lokal disana untuk mendapatkan hutan sosial saja mengalami problem yang berat. Atau untuk mendapatkan hutan adat saja yang itu tanah leluhurnya mengalami problem yang berat, misalnya tata aturan di kabupetannya Perdanya belum ada untuk mendapatkan ijin dari Kementerian Kehutanan.

Nah, problem ini nanti apalagi ini problem kebangsaan, problem apa lagi? ini adalah problem nasionalisme kita. Jadi kalau saya ngomong banyak tumbuhnya cara berpikir yang agak, yang seringkali bertentangan dengan nalar kebudayaan kita, fundamental di berbagai daerah di luar Jawa justru karena longgarnya faktor ini.

Untuk itu, penekanan saya kepada Bapak Gubernur adalah menekankan kepada semua kabupaten kota yang dibawah wilayah otorisasi kewenangan Bapak Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat untuk memberikan perlindungan kepada penduduk setempat yang asli masyarakat setempat. Kenapa? Karena mereka tidak mendapat.

Kemudian yang berikutnya adalah membuat skema keuangan. Dari seluruh aspek yang diperoleh, baik yang buget resmi melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Kabupaten maupun buget yang dimiliki oleh seluruh perkebunan dan pertambangan yang ada disitu. Kalau hanya 2,6 juta jiwa dibagi 5 itukan hanya sekitar 500-600 ribu KK. Kalau 600 ribu KK satu rumah dibangun dengan nilai 150 juta saja dana pertambangan itu masih lebih, dana sawit itu masih lebih. Kalau mereka juga tiap bulan disubsidi susunya, disubsidi telurnya masih cukup. Menurut saya skema inilah yang harus dibuat di Kalimantan, di Sumatera agar tidak terjadi ironi, hutannya habis, tambangnya habis, yang kaya orang lain, yang menderita masyarakat. Kenapa? Karena karakter penambang persisi karakter laki-laki seperti saya ke PSK. Kenapa? Datang, beli, bayar, tinggalkan, besok mau kena HIV, mau kena apapun tidak ada urusan, ini karakternya. Nah, ini yang harus segera diperbaiki, jangan sampai nanti yang menerima penyakitnya adalah penduduk yang asli situ yang tidak bisa pergi kemanapun.

Nah, jadi ini yang dibuat, desain yang harus segera dibuat. Rancangan ini menurut saya didesain bukan hanya persoalan tata ruang wilayah, bukan hanya soal pemetaan tambang, bukan persoalan pemetaan HPH, bukan hanya pemetaan sawit akan tetapi desain keuangan yang harus segera dibuat. Sehingga dalam berapa tahun orang Kalimantan hidupnya sejahtera, pendidikannya baik.

Terakhir, daripada kita langsung bikin nerobos hutan, bikin jalan ke kampung yang hanya 3000 orang itu. Dan setelah dibuka mereka tergusur oleh para pendatang atau oleh para pengusaha baru. menurut saya Bapak Gubernur data anak-anak pedalaman yang memiliki kualifikasi yang baik untuk disekolahkan di kota, di ambil di sekolahkan di kota, bukan bangun sekolah disitu, tapi mereka diambil dan disekolahkan di kota untuk mendapatkan pendidikan. Kalau nanti kampungnya dibuka, mereka sudah menjadi orang-orang yang siap membangun kampungnya karena pengetahuan dan pendidikannya sudah sangat memadai. Jadi mereka nanti akan membangun kampungnya.

Jadi kalau bangun di dalam sulit, menurut saya daripada bangun di dalam bangun jalan dan jembatan berapa puluh miliar, lebih murah mereka dikasih bea siswa pendidikan untuk disekolahkan oleh Bapak Gubernur, Bupati, Walikota dipusat-pusat kotanya atau dikirim ke UGM, dikirim ke ITB, dikirim ke UI, sehingga 10 tahun kedepan mereka akan bisa mengembangkan dirinya sendiri.

Saya termasuk, ini ngomongnya dengan hati Pak, kalau sudah menyangkut orang para penganut aliran kepercayaan, orang-orang asli nusantara. Karena kalau kita menertawakan orang Aborigin, kita menertawan orang Indian. Nanti suatu saat kalau kita tidak merubah mainset pembangunan kita akan mengalami hal yang sama. Penduduk lokal, penduduk asli, suku yang aslinya mereka akan tergusur dikampungnya sendiri.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Ketua atas kuliah umumnya yang sungguh bijaksana, sungguh baik, karena beliau ini salah satu kepala daerah terbaik di Jawa Barat.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Gubernur Kalimantan Tengah untuk menyampaikan jawabannya. Tadi teman-teman Anggota menyampaikan tidak perlu ada kesimpulan, dikarenakan tidak ada data, apa yang mau disimpulkan.

Silakan.

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Wakil Pimpinan Komisi IV DPR RI dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI.

Dan kami sudah mendengarkan dan kami catat untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, saya mohon maaf sebetulnya dari awal tadi sambutan saya sampaikan, karena keadaan kami, kami tidak bisa menghadiri beberapa kali, kalau tidak salah sudah dua kali undangan. Kami mohon maaf.

Terus yang perlu kami sampaikan juga mengenai data nanti kenapa tidak bisa kami berikan, bukan tidak bisa diberikan, Cuma waktu karena nanti dari Kadis Hutan akan menjawab data hampir seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang bertanya itu mengenai data. Nanti dijawab Bapak Kadishut karena ada kaitan-kaitan yang harus kami. Sebetulnya tidak harus dijaga juga hal-hal yang salah juga tetapi ada di dalam yang tidak nyaman ketika diminta data kami rapat waktu itu, ini saya sampaikan kepada Bapak Pimpinan Rapat dan Anggota Komisi IV DPR RI. Ketika diminta itu ada Anggota DPRD RI dari Ketua Poksi sampai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu terkena OTT oleh KPK. Data itulah yang kami, setelah saya rapat di Komisi IV DPR RI, ketika kami rapat itu seminggu kemudian ada Ketua Poksi dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan itu ketangkap oleh KPK. Nah, terus ada penggeledahan-pengeledahan di Dinas Kehutanan termasuk Dinas Perkebunan dan Dinas ... dan Pertambangan. Ibu bukan satu alasan tapi bukan satu alasan yang kami cari-cari, tidak. Tapi memang kenyataannya memang begitu.

Saya minta ini di depan Pimpinan Komisi IV DPR RI, kami juga pasti mohon bantuan kepada Pimpinan dan Wakil Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, karena kami pun Pemerintah Daerah itu sangat membutuhkan Bapak-bapak semuanya, karena kami termasuk kami anggap biarpun angka kemiskinan kami itu dibawah nasional, bahkan mungkin di Kalimantan kami angka kemiskinan sedikit tapi menurut kami sebagai Gubernur itu masih itu data BPS, tapi menurut data kami itu masih banyak masyarakat Kalimantan Tengah yang miskin di kebun dan dipinggir-pinggir hutan tersebut.

Nah, jawaban ini mengenai pertanyaan pertama itu dari Bapak Firman Soebagyo. Itu mengenai tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Pak, memang ini menjadi pemicu kami untuk membangun Kalimantan Tengah jadi susah Pak. Kami ingin daerah kami maju, tapi kami tidak bisa berlari kencang untuk membangun pondasi perekonomian Kalimantan Tengah, termasuk para petani. Para petani itu suatu contoh yang menyulitkan itu sejak kami jadi Gubernur Pak, ada namanya Perda Nomor 5 Tahun 2015 ditandatangani oleh Gubernur yang terdahulu sebelum saya. Ditandatangani yang mana luasan hutannya itu hampir 82% waktu itu, Perda 5 Tahun 2015, dan 18% APL (areal penggunaan lain).

Nah, hal ini pun ada orang yang ingin berinvestasi baik para petani itu banyak sekali kalau para petani andaikata mau membuka lahan kebun ujungnya ragu-ragu. Mau membuka andai kata kebun sawit apakah pertanian hortikultura, pangan, ketika mau dibuka 1 hektar, 2 hektar mereka takut nanti diperiksa oleh Jaksa, bahkan takut diperiksa oleh dari kehutanan. Nah, hal ini terjadi menyulitkan kami tentang Perda 5 Tahun 2015.

Kalau tidak salah dulu, inikan mau merevisi Perda 8 Tahun 2003 rencana Gubernur sebelumnya yang dari 33% Perda 8 Tahun 2003 itu dari 33% ingin menjadi 46%. Tetapi sebaliknya ketika beliau berakhir, beliau tanda tanganlah Perda 5 Tahun 2015 yang mana areal penggunaan lain itu lebih kecil. Saya sendiri tidak mengerti Pak, saya sendiri tidak bisa menjawab, tapi keinginan kami selaku Gubernur Kalimantan Tengah nanti kami ingin mengajukan revisi tata ruang ini Pak, tapi kami harus membatalkan dulu untuk Perda 5 Tahun 2015 yang telah ditandatangani.

Nah, mengenai saya tadi ada bincang-bincang ketika Bapak Firman berbicara masalah Lol Norwegia ini 1 miliar US Dolar. Kita Kalimantan Tengah itu mungkin dulu rencana dari Gubernur yang terdulu. Kami pun tahu mengenai karbon, karbon inikan hutan alam bisa kita jadikan karbon, bisa kita jual tetapi Kalimantan Tengah belum merasakan ini Pak. Belum pernah merasakan bantuan dari Norwegia ini. Sebetulnya mereka katakan bahwa negara-negara Eropa mengatakan, negara-negara dunia ini mengatakan bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia. Tapi pada kenyataannya kami tidak pernah mendapatkan bantuan. Nah, mengenai dana reboisasi itu Pak.

Nah, untuk HPH dan HTI ini memang banyak tumpang tindih Pak, antara kebun dengan tambang, tambang dan tambang. Nah, tambang ini dulu sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diketuk inikan berada di Bupati, dulu jumlahnya. Nanti biarpun mohon maaf dengan Pimpinan dan Wakil Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota Komisi IV DPR RI, biarpun itu berada di Komisi VII DPR RI wewenang, tetapi kami sampaikan datanya.

Kami sudah mencabut ijin tambang Pak, pertama ijin tambang itu ada 1.000 ijin di Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah, ini saya sampaikan nanti persisnya saya laporkan datanya nanti. Saya mencabut sudah 527 ijin, nah ada yang mati dan ada sisa kalau tidak salah itu 113 ijin tambang. Ini antar tambang dan tambang pun sampai ijin itu tumpang tindih sampai 20-an Pak, karena Bupati mungkin waktu itu karena Pilkada berpikir ada dijual lagi, ini yang terjadi kami dapatkan. Inikan ibaratnya cuci piring, termasuk kami sampaikan juga jawaban yang lain juga masalah ijin perkebunan. Ijin perkebunan ini sama Bapak Pimpinan dan Bapak Dedi Wakil Pimpinan, ijin perkebunan sama. Kami kan sejak kami menjadi Gubernur tidak pernah mengeluarkan ijin Pak. Ijin itu berada di Bupati, Walikota, kecuali batas antar kabupaten dan kabupaten itu Gubernur yang memberikan ijin, tetapi di Kalimantan Tengah kebetulan tidak ada.

#### **KETUA RAPAT:**

Silahkan pak.

#### **F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):**

Pimpinan, tembusan ada Pak Gubernur, semua ijin yang dikeluarkan oleh Bupati ditembuskan kepada Gubernur. Ini kebijakan strategis, sedangkan kebijakan yang tidak strategis diberikan tembusan, apalagi kebijakan yang bersifat strategis.

Terima kasih.

### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Nanti secara teknis nanti dijawab oleh Bapak Kadisbun Bapak Rawing.

Tapi yang perlu saya sampaikan Pak, kami diskusi panjang lebar untuk masalah ijin perkebunan. Ijin perkebunan ini tadi tertulis bahwa Bupati itu harus mengikuti tata ruang provinsi kalau memberikan ijin, sebaliknya juga Gubernur, begitu juga sebaliknya Pak. Tetapi yang terjadi itu para Bupati memberikan ijin ini tidak pernah melaporkan kepada Gubernur Pak, justru tidak lepas dari tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Itu yang terjadi di Kalimantan Tengah, itu yang terjadi di Kalimantan Tengah, ini carut-marut perijinan. Apalagi bukan seperti, mohon maaf kepada Pimpinan dan Wakil Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Apalagi kita inikan bukan mungkin tahu Bupati, Walikota tidak seperti DKI Jakarta yang ditunjuk oleh Gubernurnya. Mereka merasa masih mengikuti pemilihan langsung. Hal ini juga yang terjadi biarkan Undang-Undang Nomor 23, kami wakil Pemerintah Pusat di Daerah tetapi ini juga tidak ada hal tertentu yang tidak bisa jalan juga Pak.

Kami sampai sekarang yang tadi saya sampaikan kepada Pimpinan dan Wakil Pimpinan Anggota Komisi IV DPR RI, kami sampaikan bahwa kami itu membuat surat tembusan kepada Bupati, kalau tidak surat kami ini ada tembusan ke 8 Bupati yang memberikan ijin kebun. Nanti ada data yang kami berikan, itu ada 1.000.072 hektar. Ini baru surat kedua dari kami, tapi itupun belum tentu digubris Pak, tapi kami berusaha mengirim surat yang ketiga nanti, yang keempat nanti kami ambil alih ke Provinsi.

Nah, yang lain yang penanya kedua Bapak Azikin. Bapak Azikin saya terima kasih Bapak, Bapak sudah memberikan saran dan masukan kepada kami mengenai data ini. Sekali lagi saya sebagai Gubernur meminta maaf kepada Pimpinan, Wakil pimpinan, dan Anggota Komisi IV DPR RI. Kami berusaha melengkapi data yang betul-betul konkrit dan betul-betul ini data tidak berubah-ubah lagi. Ini juga saya itu Pak, selalu dengan Kepala Dinas dan Disbun ini mereka ini saya panggil untuk menyediakan data apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi. Saya itu tidak mau data yang asal, kami banding-bandingkan banyak laporan-laporan juga kepada kami. Ini kami lengkapi nanti data kami berikan tapi nanti pada akhirnya juga kami ingin bicara dengan unsur Pimpinan nanti dengan Bapak Ketua dan Wakil Ketua.

Mengenai ijin usaha sudah, yang masalah ilegal. Masalah ilegal ini saya setuju Pak, kami dari keluarga yang sangat miskin, kami bisa keluar dari kemiskinan karena kami bekerja keras. Kami merasakan koperasi-koperasi besar masuk ke Kalimantan Tengah, kami keluarga yang sangat miskin Pak Wakil Pimpinan Bapak Dedi, bukan keluarga yang dari ada dulu. Kami merasakan bagaimana dulu waktu HPH dari luar masuk ke Kalimantan Tengah perijinan baik perkebunan masuk Kalimantan Tengah, kebun dan tambang semuanya. Masyarakat itu hampir tidak ada merasakan apalagi yang kalau namanya tadi apakah ada manfaat untuk keberadaan perkebunan di Kalimantan Tengah. Kalau saya melihat bagi negara ada Pak, bagi daerah

kami mungkin kecil. Seperti contoh, kembalinya dana itu ke Kalimantan Tengah pasti ada hasil dari pajak. Tetapi untuk memerangi kemiskinan warga ini hampir tidak ada, contoh dana sawit yang dikumpulkan oleh pusat yang 50 Dolar per ton kalau tidak salah itu belum ada. Kami menyoroti juga Pak, Bapak Presiden kami surati bahwa dana sawit itu mestinya untuk pembangunan daerah Pak, supaya kami bisa kembalikan kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan dan penghijauan juga nantinya.

Nah, ijin-ijin legal ini kalau memang mau Pak, kalau itu memang mau diberlakukan Undang-Undang itu mestinya hampir seluruh kebun mungkin 99% bisa dicabut semuanya Bapak Firman. Tapi disini juga kan ada tenaga kerja dan sudah terlanjur. Dulu sejak reformasi itu mestinya mohon maaf Bapak Pimpinan dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mestinya para Bupati ini menahan bahwa tidak ada pelaksanaan plasma, ini semestinya tidak boleh kalau tidak ada plasma, tapi kenyataannya ada pembiaran.

Nah, sekarang karena Undang-Undang kami ada bagian juga di kebun di bawah, kami juga ada mengeluarkan ijin, ini tidak bisa kami range. Kami mohon maaf, tetapi kami akan berusaha ini merapikan dan minta memohon bantuan dari Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dan Anggota Komisi IV DPR RI. Karena Bapak-bapak yang mulia yang terhormatlah yang bisa membantu masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan haknya dan perusahaan ini menjalankan kewajibannya. Ini memang terjadi bahwa di Kalimantan tengah itu bukan cuma di Jambi saja, tapi ini kejadian ada kebun dengan luasan 130 ribu andaikata tapi mereka tidak punya plasma, ada punya 3 ribu hektar. Hal ini yang terjadi Pak Azikin ini pertanyaan kedua dari Azikin.

Ini pertanyaan ketiga dari penyampaian data, Mbah siapa tadi? mohon maaf, penyampaian data ini kami segera lakukan Pak. Mudah-mudahan bisa dalam 3 hari data ini, bisa? Bapak Pimpinan, kami janji dalam satu minggu kami kirim data.

#### **KETUA RAPAT:**

Bapak Gubernur, saya tidak perlu satu minggu, saya kasih waktu satu bulan. Supaya jangan nanti katanya datanya kurang, tidak valid, kalau seminggu terlalu cepat. Kita juga jangan terlalu mendesak supaya datanya valid dan benar. Jadi nanti sebulan lagi tolong data diserahkan ke Sekretariat Komisi IV DPR RI.

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Siap Bapak Pimpinan.

Jadi begini Pak, karena data itu sudah ada semestinya, karena saya sudah instruksikan lama. Karena kemarin ada OTT itu saja Pak, kami tidak berani membuka itu. Penyampaian data ini segera Mbah, kami lakukan. Jadi mohon maaf belum kami sampaikan tapi mudah-mudahan dalam satu minggu

ini Kepala Dinas nanti termasuk tambang juga kami sampaikan, karena ada kaitan juga dengan kehutanan.

Pertanyaan keempat dari Bapak Made Urip, penegakan hukum ini sangat penting Pak. Kebetulan saya juga lagi baru menangkap kapal, saya menangkap kapal dan kebetulan saya ada jalan-jalan kemarin. Terus saya lihat kapal besi itu muat kayu log 2,6 meter. Saya tanya ke Kadishut saya itu sudah berapa kali kapal besi ini ngangkut kayu? Ini yang terjadi di Kalimantan Tengah. Sudah 8 kali katanya ke Pulau Jawa membawa kayu, itu kapal bisa memuat 2000 sampai 4000 kubikan. Ini yang terakhir kedelapan kalinya, delapan kali saya tangkap Pak dan kami sedang proses di Gakum di Kehutanan. Saya minta ini diproses, kemarin kami lagi memanggil orang yang punya kapal dan yang punya kayu juga Pak. Ini penegakan hukum di Kalimantan Tengah yang kami lakukan dan ini menyangkut PAD ujungnya, kearah pendapatan hasil daerah Kalimantan Tengah. Disinilah kebocoran-kebocoran yang terjadi Pak, ini kami lakukan.

Mengenai pabrik dan lahan sama tadi yang saya jawab, pabrik ini kami juga ada pabrik-pabrik ini kami awasi, termasuk lingkungan juga. Itu kami awasi dan bahkan kemarin Anggota DPRD Provinsi yang tertangkap itu oleh KPK itu dari masalah lingkungan Pak. Kami lagi merapikan lingkungan dan kami serius. Kalau Gubernurnya serius Pak, tinggal Kepala Dinas yang sedang kami awasi. Kami di Kepala Dinas ini sudah 4 kali kalau tidak salah 5 kali ganti Pak. Ini saya PLT-kan saking gregetnya saya, karena saya anggap masih kurang memuaskan kerjanya.

Memang betul disini ada dua tadi ada pertanyaan dua dari Pak Made Urip juga 282 unit ada sekitar 3 juta hektaran. Nanti kami kasih data yang *real* Pak, pas data yang ada di kami yang kami ambil dari kabupaten. Dan ada 169 ijin tambang yang tumpang tindih. Ini tumpang tindih memang di Kalteng rata-rata ada antara perusahaan dengan perusahaan yang mengambil posisi ini biasanya yang sudah itu Bapak Gubernur Pak. Karena kalau sudah ada ijin-ijin yang tumpang tindih itu pasti larinya ke Gubernur. Kami itu seperti mencuci piring ketika kami jadi Gubernur dari kebijakan-kebijakan kabupaten dari bupati.

Yang penanya mengenai flora dan fauna, ini kami jaga Pak. Maka dari itu, kami mengusulkan nanti ada 58 HPH kalau tidak salah di Kalimantan Tengah yang melakukan eksplorasi hutan. Itu menghasilkan 3.000.500 kubik kayu per tahun. Tapi semestinya ini kami sudah mendesak Ibu Menteri LHK supaya bisa dibicarakan juga minta tolong juga kepada Pimpinan dan Wakil Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota Komisi IV DPR RI supaya ini pengalihan untuk produksi hilirisasinya harus ada di Kalimantan Tengah Pak. Kalimantan Tengah itu diambil kayu diproduksinya di luar Kalimantan Tengah, seperti di Pulau Jawa, Sumatera, padahal kayu itu dari Kalimantan Tengah, termasuk dari Kalimantan yang lain. Kemarin itu saya mengajukan kepada Menteri LHK supaya dimoratorium saja HPH ini sekitar 50 tahun Pak, menjaga kekayaan hayati. Karena banyak sekali obat-obatan yang ditemukan di alam Kalimantan Tengah seperti untuk obat kanker itu akar Bejakah yang kemarin salah satu siswa-siswi kita yang mendapatkan penghargaan dari

penemuan itu juara satu dunia Pak, di Korea Selatan. Ini sedang kami lakukan hak patennya, belum lagi banyak sekali kekayaan yang lainnya yang kekayaan seperti binatang kura-kura bukit itu untuk penyembuh orang yang digigit ular kobra. Nah, ini kami jaga dan kami minta tolong mohon bantuan kepada Pimpinan dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dan Anggota Komisi IV DPR RI supaya HPH ini dimoratorium, tidak ada untungnya juga untuk Kalimantan Tengah dan juga menjaga tadi pemanasan global. Kita meminta juga kepada dunia untuk memperhatikan Kalimantan Tengah. Itu yang kami minta Pak.

Nah, yang kelima Pak, ini Mbak Alien Mus mengenai data sama pertanyaannya kurang lebih penggusuran. Ini betul di Kalimantan Tengah tentu ada penggusuran selalu berhadapan terus antara masyarakat dan aparat yang menjaga kebun ataupun satpan yang didalamnya.

Penanya keenam Bapak Guntur, HPH dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Memang ini kendala kami masalah tata ruang ini sangat kami butuhkan. Tapi harus membatalkan Perda itu dulu, karena sudah ditandatangani Perda Nomor 5 Tahun 2015 itu, harus dibatalkan dan ini sedang kami lakukan Pak. Karena tanpa itu kami tidak bisa membangun, biarpun dari Kementerian Kehutanan itu, dari Kementerian LHK sudah menyiapkan *outland*-nya Pak. *Outland* itu ada 46% yang mereka persiapkan tetapi itu lambat Pak, kita contoh ada beberapa orang investasi datang ke Kalimantan Tengah seperti Bapak Presiden ingin investasi harus dilayani Pak, kami layani seperti raja andaikata perijinan harus dipercepat semuanya.

Andaikata mereka ingin menanam singkong, terus menanam jagung butuh lahan 40 ribu hektar atau 10 ribu hektar. Itu selalu nanti diajukan ke Kementerian Kehutanan ataupun melewati KPH. Nah, sekarang yang sedang berjalan itu melewati KPH itu untuk pertanian tebu. *Bismillahirrahmanirrahim, insya allah* nanti di tahun 2022 Kalimantan Tengah sudah menghasilkan gula nanti Pak. Jadi tidak tergantung lagi dari Provinsi lain untuk gulanya.

Nanti yang tidak bisa saya jawab, nanti Kadis yang menjawab. Mengenai penggusuran sama ini, penggusuran ini memang saya Pak, karena kami pernah bagaimana jadi orang yang sangat miskin itu susah Pak. Dulu kalau ditanya kami bertiga ini Pak, kalau inikan dari pulau sebrang, tapi kalau Bapak nanya kami dan Bapak Rawing, pernahkah berdua ini Bapak tanya sekarang, Bapak Gubernur berdua dulu itu pernah jadi pelaku ilegal logging tidak, pernah jadi pelaku ilegal mining tidak? Pasti kami katakan iya, seluruh anak Kalimantan pasti pernah melakukan itu, karena kami orang miskin bukan orang yang berada. Dulu merasakan juga dikejar-kejar aparat, untung bisa keluar dari kemiskinan. Nah, bagaimana jadi orang miskin itu susah. Nah, inilah sekarang yang sedang kami perjuangkan Pak.

Untuk pertanyaan ketujuh dari PDIP Bapak Ansi Lema, jadi justru data ini Pak, saya lagi rapatkan lagi. Saya kaget juga tadi malam ini biar saya langsung saja Bapak Rawing ngasih data kepada saya itu kemarin 2 juta hektaran, terus sekarang berada di angka 1,7. Data Bapak dan Bapak Disbun itu sudah betul, tapi dulu Bapak Disbun ngasih saya 2 juta angkanya. Ini

mohon maaf karena ada, saya setuju data ini kayaknya yang terakhir ini yang *real* karena 1,7 dulu kan 2 jutaan.

Untuk perhatian kepada para petani menyangkut B20, B30. Jadi para petani kebun ini Pak, mereka belum ada pabrik, mereka ada TBS, bosgard tetapi mereka masih menjual-jual ke perusahaan dan ada juga menjual ke perusahaan yang non kebun, ada beberapa di Kalimantan Tengah kalau tidak salah ada 3 Pak. Karena saya melihat produksi TBS itu tinggi, bahkan plasma masyarakat tinggi supaya menjaga TBS ini harganya tetap bagus, maka yang non kebun itu kami berikan ijin kemari nada 3 perusahaan kalau tidak salah pabrik yang untuk menjaga. Tapi apakah B20 dan B30 ini sudah kesana arahnya para petani. Kami kelola inikan untuk kesejahteraan para petani sawit yang ada di Kalimantan Tengah. Mengenai data sama, kami pastikan mudah-mudahan dalam satu minggu ini bisa kami berikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dan wakil-wakil Pimpinan.

Dari pertanyaan delapan Ibu Wulan juga sama, Ibu Wulan masih keluar beliau. Ibu Wulan masalah data ini kami pastikan dalam satu minggu Pak Pimpinan, Pak Rawing disiapkan datanya. Nanti minta dengan staf ahli saja, disiapkan juga diemail, dikirim juga iya, biar cepat.

Yang terakhir dari Bapak Dedi Wakil Pimpinan, ini sangat bermanfaat bagi kami Bapak. Tadi dari dalam juga memberikan masukan mengenai bagaimana mendesain tingkat pendapatan PAD Kalimantan Tengah. Sebelum kami jadi Gubernur, Kalimantan Tengah itu APBD-nya berada di 3 triliun 400 miliar. Sekarang APBD Kalimantan Tengah *alhamdulillah* berada diangka 5 triliun 400 miliar. Biarpun belum semestinya dan luas Kalimantan Tengah, paling minim harus diangka 8 triliunan Pak. Dulu PAD Kalimantan Tengah itu berada di angka 511 miliar, sekarang bisa menjadi naik 1 trilliun 700 miliar lebih. Mudah-mudahan bisa naik ke 3 dan 4 triliun, kalau itu dibantu nanti bisa kesana Pak. Karena saya ingin mengenakan juga pihak ketiga kepada para perkebunan dan pertambangan Pak, yang masih ribut dengan, bukan ribut dari pihak Kepolisian mengatakan itu salah, tetapi saya sudah berkordinasi dengan Mendagri, dengan KPK, dengan Saber Pungli saya ingin ada pihak ketiga dari CPO yang keluar dari Kalimantan Tengah.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Bapak Pimpinan, interupsi Pak.

PAD-nya Kalimantan Tengah itu berapa Pak?

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

PAD-nya Kalimantan Tengah berada di angka 1 trilliun 700 miliar. Semestinya kalau itu memang dirapikan itu bisa berada di angka 4 triliunan Pak, dari minyak dan semuanya. Kami selalu untuk kesejahteraan masyarakat ini kami pastikan kami mengarah kesana.

Kami mengerti Bapak Dedi, bahwa banyak anak-anak yang putus sekolah. Banyak yang mau ke SD saja mungkin 30% itu putus Pak, yang mau ke SMP, yang mau ke SMA juga ada yang putus. Jadi hal ini yang sedang kami lakukan untuk yang SMA-nya, SMA itu ada wewenang di Gubernur. SD dan SMP-nya karena melihat anggaran ini kami bagi kabupaten-kabupaten Pak. Saya minta kepada para Bupati supaya ini, ini masukan Bapak sangat luar biasa Pak. Dan menyadarkan kepada kami juga ada masukan mengenai, di Kalimantan Tengah adatnya ada, karena di seluruh Indonesia pasti ada adat. Tapi di Kalimantan Tengah sangat lucu hutan adat itu tidak ada Pak, ini juga yang sedang diperjuangkan untuk hutan adat juga kami perjuangkan di Kalimantan Tengah Pak.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Pimpinan, mohon ijin saya boleh tambahkan Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Terima kasih.

Bapak Gubernur, Bapak bicara soal petani, masyarakat kecil, tampaknya keberpihakannya luar biasa Pak. Kang Dedi tadi mengingatkan soal pentingnya bagaimana membangun masyarakat terutama masyarakat yang dekat secara *cultural*. Saya mau tanya sedikit, Undang-Undang itukan mengamanatkan bahwa korporasi yang invest disana kan harus punya CSR (Corporate Social Responsibility). Saya ingin tanya berapa persen yang selama ini sudah didapatkan disana, dialokasikan untuk apa saja untuk pembangunan masyarakatnya Pak. Karena tadi ada ngomong mengenai pendidikan, ada ngomong mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat sekitar dan seterusnya. Mohon maaf ini Pak, karena kita ingin sesuatu yang betul-betul Bapak politisi, tapi saya hari ini ingin melihat Bapak itu sebagai seorang yang juga punya kompetensi technocratis Pak. Jadi mohon maaf jangan terlalu banyak orasi Pak, saya ingin tahu betul Pak, soal itu dialokasikan berapa, dari perusahaan apa saja, persentasenya bagaimana, dan seterusnya Pak.

Terima kasih Pak.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Terima kasih Pak, atas pertanyaannya.

Begini Pak, secara riil untuk CSR itu belum ada laporan secara khusus, tapi ada beberapa perusahaan yang membantu secara langsung. Tapi saya meyakini hampir 90% tidak jalan Pak. Tapi kami akan, kenapa kami lakukan mengenai SPK, karena tidak jalannya CSR, karena perusahaan itu kadang-

kadang andaikata dia membuat sekolah di perkebunan, SD, SMP, SMA ataupun TK, itu memang kewajiban mereka itu bukan CSR. Nah, mereka menganggap itu CSR, tapi bagi kami Pemerintah Daerah itu bukan CSR, namanya juga itu kewajiban mereka membangun sekolah untuk warga mereka sendiri.

Menurut saya Pak, karena ini secara laporan saya tanya selalu itu bahwa CSR dijalankan, maka kemarin SPK. Tapi itupun belum jalan maksimal, kalau maksimal itu besar Pak, dari situ bisa untuk kesehatan dan untuk pendidikan, arah kami kesana Pak. Ini kami bicara dengan hati Pak, apa yang kami lakukan ini pernah kami lakukan sudah, bukan kami cuma orasi, tapi kami sudah melakukan. Melakukan ada terhambat, ada yang tidak jalan Pak. Karena keterbatasan kami sebagai Gubernur bukan seperti kebijakan seorang Presiden yang bisa begini langsung Pak.

Terima kasih.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Mohon maaf Pak.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

*Enjeh.*

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Kalau kita tahu disana korporasi besar yang berinvest Pak, korporasi inikan paling takut dengan citra negative Pak. Jadi sebenarnya korporasi itu butuh *trust*, bagaimana *performance* mereka dalam berusaha dan berinvestasi Pak. Saya kira kalau kita punya data soal itu bahkan soal tanggungjawab dia dalam hal CSR, karena ini amanat Undang-Undang Pak, bukan saya yang katakan atau Bapak Gubernur yang asal saja menambah *item* itu. Nah, karena itu, kalau boleh kedepan juga ada data perusahaan-perusahaan itu disana, CSR-nya apa mereka kucurkan, kemana kita juga ingin tahu Pak. Karena kalau tidak nanti kasihan nanti yang dikatakan Kang Dedi tadi, masyarakat kita ini sekedar dieksploitasi, alam juga dieksploitasi sementara sustainabilitas dan keberlanjutannya itu tidak diperhatikan.

Saya kira demikian Pak.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Nambah Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Mau ngomong?

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Iya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):**

Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat,  
Bapak Gubernur dan jajarannya yang hadir di pagi hari ini yang saya hormati.

Dari beberapa hal pembicaraan saya ingin menanggapi begini Pak, ijin Pimpinan. Kalau dari sisi bahwa pengakuan bahwa kita itu orang miskin dan bisa keluar dari kemiskinan, seharusnya sudah menjadi sebuah konsepsi, dalam sebuah kebijakan. Bagaimana orang-orang Kalimantan, orang Dayak yang miskin-miskin itu bisa menjadi keluar dari kemiskinan, musuhnya adalah para pengusaha yang merusak sealam Kalimantan. Yang merusak alam itu negara dirugikan, rakyat dirusak.

Kalau bicara tentang Kalimantan, saya yakin Bapak Gubernur beserta jajaran lebih tahu daripada saya. Tapi kalau kita bicara kesebuah kenyataan kenapa ini rusak berat. Nah, inikan ide dan kenyataannya berbeda itu, pasti ada masalah, kesalahan ini dilakukan pasti bersama-sama. Dalam sebuah tatanan kenegaraan dan ini jutaan hektar yang rusak dan bukan bersembunyi tapi mata telanjang melihat, haqul yakin Pemerintah di Kalimantan banyak yang tahu dan Bapak-bapak pasti tahu. Tapi masalahnya adalah kalau ini dilakukan oleh siapa, Bapak berani terbuka tidak. Orang pusat yang melakukan, *backing*-nya orang ini, atau orang daerah yang melakukan, berani tidak terbuka, atau ini kita keliling-keliling ini kayak Tawaf.

Nah, kita ingin kenyataan, mana tampang-tampang yang merusak, mana perambah hutan yang merusak, mana para pengusaha HPH yang merusak. Disederhanakan bahasa kita itu adalah karena memang di Undang-Undang Minerba, tambang sudah Provinsi kewenangannya. Perusahaan ijin rekomendasi di Bupati, keputusan ada di pusat dan Gubernur. Nah, kita hari ini mau diapakan agar lahan Kalimantan itu bisa melepaskan orang-orang miskin jadi kaya, orang Dayak.

Itu mungkin yang saya tadi pikirkan pernyataan dari Bapak Gubernur tadi, kenapa tidak menjadi sebuah kenyataan, padahal Bapak Gubernur bisa keluar dari situ. Orang Dayak ini ingin keluar dari kemiskinan bagaimana caranya. Dan Bapak Gubernur adalah orang Dayak asli.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT**

Terima kasih atas wejangannya.

Bapak Gubernur apa mau dilanjutkan kembali atau ada yang mau menambahkan silakan.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Ijin Pimpinan, saya mau keluar sebentar.

**KETUA RAPAT:**

Boleh.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (SUGIANTO SABRAN):**

Keluar maksudnya ke toilet Pak, kalau ditahan untuk ginjal juga tidak bagus untuk kesehatan. Nanti dilanjutkan untuk yang belum terjawab tadi biar, mohon ijin tidak mengurangi rasa hormat saya Bapak Disbun dan Dishut saya yang menyampaikan untuk tambahan.

Terima kasih.

**KEPALA DINAS KALIMANTAN TENGAH:**

Bapak Pimpinan, ijin.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**KEPALA DINAS KALIMANTAN TENGAH:**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI yang saya hormati,  
Bapak Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Saya hanya menambah dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Yang pertama adalah terkait data, data memang kita belum menyampaikan mungkin kondisi case-nya sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, tetapi memang kita harus juga mengkompilasi dengan berbagai instansi terkait.

**KETUA RAPAT:**

Saudara Bapak Kepala Dinas, tidak ada alasan bilang kompilasi atau apa, sudah 2 tahun Pak. Jadi jangan cari alasan ini, itu, ini sudah 2 tahun, maka nanti saya suruh buat pernyataan selambat-lambatnya 30 hari data secara komplit dan rinci diserahkan. Kalau tidak kami akan serahkan ke penegak hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar, itu saja.

**KEPALA DINAS KALIMANTAN TENGAH:**

Siap Pak.

Ini ada namanya keterlanjuran Bapak, sehingga nanti formatnya sebelum kita sampaikan saya akan berikan prosesnya, bahwa ada perkebunan-perkebunan yang semula dianggap ilegal ternyata ada solusi oleh Pemerintah dengan skema Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104, sehingga nanti akan kita sampaikan dan ini sudah saya siapkan. Mungkin dalam waktu seminggu sampai satu bulan saya sampaikan.

Terima kasih.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 diperpanjang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 104 itu namanya keterlanjuran, sehingga ada solusi oleh Kementerian KLHK untuk melegalisasi perijinan-perijinan yang sudah terlanjur ada dilapangan realisasinya.

Yang kedua adalah tata ruang memang di Kalimantan Tengah sudah ada tata ruang Nomor 5 Tahun 2015, tetapi memang belum mengakomodir dari kepentingan-kepentingan daerah sehingga kita kedepan kita sudah menyampaikan konsep revisi menuju ke 46% atau sekitar 7 juta untuk wilayah APL.

Yang ketiga ada letter of inten dengan Norwegia memang Kalimantan Tengah dulu menjadi semacam contoh yang pernah kita membuat kantor di LH sebetulnya Redd Plus tetapi era Bapak Presiden Joko Widodo sudah tidak ada lagi, sehingga sampai saat ini memang belum ada pengaruhnya atau kontribusi yang memadai pada Pemerintah Provinsi.

Yang selanjutnya adalah tentang flora fauna memang kita masih ada semacam yayasan Pak, ada BOS (Yayasan Orang Utan Survival) yang masih ada di Kalimantan Tengah, sehingga Bapak-bapak ketika datang ke Kalimantan Tengah biasanya kita lihat orang utan yang ada disana.

Yang selanjutnya adalah ilegal logging memang kita tidak pungkiri pasti masih ada, tetapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk kaki-kakinya Dinas Kehutanan yang berada di daerah, yaitu KPH sebanyak 18 KPH yang berada di lapangan sehingga akan meminimalisir kegiatan-kegiatan ilegal logging.

Yang selanjutnya adalah tentang HPH memang sebetulnya kita kontribusi HPH yang selama ini adalah ... HDR yang memang rata-rata memang tidak 700 sampai 800 miliar per tahun tapi memang dengan berbagai bagian oleh Pemerintah Provinsi kurang lebih 250-300 miliar per tahun.

Saya kira itu Pak, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya silakan.

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN:**

Mohon ijin Bapak Gubernur, menambahkan.

Pimpinan Rapat yang saya hormati,  
Wakil Ketua Pimpinan Rapat, serta Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan.

Kami hanya menambahkan beberapa hal terkait kepada masalah ijin perkebunan, kemudian terkait gas, kemudian masalah plasma dan apa yang disampaikan Bapak Gubernur.

Pertama, Bapak Gubernur Kalimantan Tengah bukan karena saya memuji. Beliau memang sebetulnya luar biasa Pak, ingin menertibkan perijinan ini. Karena ijin-ijin kebun itu kalau dia berada di Kabupaten merupakan kewenangan Bupati, kalau dia lintas itu kewenangan Bapak Gubernur. Tapi ternyata yang lintas ini hasil pemekaran wilayah, sehingga pada saat Bapak Gubernur menjabat itu tidak ada ijin yang diterbitkan oleh ....

**KETUA RAPAT:**

Bapak, jabatannya sekarang apa?

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN:**

Kadisbun.

**KETUA RAPAT:**

Bukan Gubernur tidak mengeluarkan, tetapi karena moratorium oleh Pemerintah Pusat. Jangan dibalik-balik Pak, Gubernur tidak mengeluarkan karena ada moratorium untuk Kalimantan Tengah tidak boleh ada pembangunan kebun sawit lagi. Jadi jangan dibalik-balik ngomongnya Pak, saya ini sangat paham masalah peraturan Pak.

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN:**

Pak, belum habis Pak, mohon ijin saya, boleh tidak Pak.

Saya bicara Undang-Undang Perkebunan Pak, jadi ijin yang ada itu aturan Undang-Undang Perkebunan yang berada di kabupaten, kewenangan Bupati dan Walikota. Kalau dia berada di lintas, nah itu dia, lain halnya dengan nanti ada moratorium kita juga ngerti Pak, sebelum saya jauh kedepan, saya akan menyampaikan itu.

Jadi pada saat ini memang tidak ada ijin, nah itulah kendala kita juga di daerah. Nah, kemudian terkait legal dan tidak legal. Saya tidak berani menjustifikasi apakah kebun ini legal atau tidak. Selama dia memiliki ijin usaha perkebunan dia itu legal berdasarkan Undang-Undang Perkebunan. Nah, kecuali proses kita tidak tahu, karena ijin perkebunan itu dibelakang setelah ada ijin lokasi di pelepasan....

**KETUA RAPAT:**

Saya jelaskan Gubernur anda pernah ngomong ada kebun ilegal 850 ribu hektar. Pertanyaan itu waktu kami datang kesana dan dibacakan juga disini. Jadi ini yang bertentangan asal anda jelas.

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN:**

Tadi minta jelaskan mana yang legal dan tidak, tapi kita memang ada yang belum mendapatkan pelepasan.

**KETUA RAPAT:**

Berarti kan ilegal, coba kalau kebun ada ijin perkebunan pelepasannya belum ada, apa namanya.

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN:**

Itu keterlanjuran Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tidak ada keterlanjuran, dalam pelanggaran tidak ada istilah keterlanjuran. Saya tegaskan disini, silakan lanjutkan.

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN:**

Kemudian terkait kepada pendapatan di sektor perkebunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan di sektor perkebunan itu adalah pajak ekspor, pajak pendapatan dan pajak penggunaan. Dan yang hanya dikelola oleh daerah itu adalah pajak kendaraan. Jadi makanya walaupun sawit luar biasa Kalimantan Tengah tetapi pendapatannya kecil. Nah, ini maksudnya dengan adanya misalnya pajak ekspor minta dikembalikan dengan daerah. Itu yang sehingga membantu masuk.

Itulah kira-kira tambahan sedikit Pak.

Sekian dan terima kasih.

**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Bapak Ketua, sedikit Pak.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Firman.

**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Bapak Kepala Dinas, terima kasih atas penjelasannya.

Namun Pak, tadi yang Bapak sampaikan tentang keterlanjuran. Saya membaca Undang-Undang dan saya memimpin Komisi IV DPR RI dan jadi Anggota Komisi IV DPR RI sampai sekarang Pak. Di Undang-Undang manapun itu tidak mengenal istilah keterlanjuran, bahkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 jelas ada pasal yang mengamanatkan, bilamana ada masyarakat atau orang per orang yang menanam di kawasan hutan, maka itu disita oleh negara, itu jelas *clear*, karena waktu itu saya Ketua Panjanya.

Oleh karena itu, saya heran apakah kedudukan Undang-Undang ini lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah. Harusnya Peraturan Pemerintah itu di bawah menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan Undang-Undang. Oleh karena itu, mohon penjelasannya apakah Peraturan Pemerintah ini tahun berapa dikeluarkan oleh Menteri siapa, ini mesti kita harus telusuri. Karena ini jangan sampai kalau ini keterlanjuran-keterlanjuran ini diselesaikan dengan cara-cara peraturan, nanti Gubernur, Bupati juga bisa bikin peraturan yang sama, akhirnya tidak menyelesaikan masalah.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Anggota cukup?

Jadi saudara Gubernur tadi sudah mendengar penjelasan masukan dari Anggota. Yang pertama, saudara Gubernur tadi mengatakan adalah salah satunya sepulang dari sini seminggu kemudian Anggota DPRD beserta Pimpinannya ditangkap KPK. Saudara Gubernur disini tanggal 23 Juli 2018, Anggota dan Pimpinan DPRD ditangkap KPK 27 Oktober 2018. Itu kasusnya adalah suap ijin pembuatan limbah sawit ke Danau Sembuluh, di Kabupaten Seruyan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan data yang diminta, supaya Bapak Gubernur jangan dibohongin, itu saja. Bagaimana pun anda adik saya.

Yang kedua, tadi mengatakan mengenai cuci piring, ada lagi masalah karbon Norwegia. Norwegia itu menjanjikan 1 miliar Dolar Bapak Firman, yang baru cair 250 juta US Dolar, tetapi itu dikelola oleh Kementerian LHK, karena kemarin juga saya tanyakan.

Kemudian tadi dikatakan permasalahan RTRWP, masih ingat karena saya 10 tahun di Komisi IV DPR RI waktu itu Gubernur yang lalu minta RTRWP, yang menolak saya. Walaupun kami satu partai tetap saya tolak, karena apa? baru rapat pertama yang Bapak Firman katakan tadi, sepulang rapat dari sini para Bupati ada Bupati keruangan saya. Itu yang diajukan

Gubernur tidak sesuai dengan permintaan kami, kami mintanya begini. Saya masih ingat kalau tidak salah, salah satunya Bupati Gunung Mas. Terus apa yang mau kami setuju? Begitu saudara Gubernur dilantik termasuk Bapak Sri ini juga, tolong segera buat tim terpadu, ajukan. Tapi *alhamdulillah* sampai Gubernur mau habis jabatannya, *insya Allah* nanti periode kedua juga tidak jalan ya tidak apa-apa. Bagi kami tidak rugi, tetapi yang rugi adalah masyarakat Kalimantan Tengah.

Ini loh permasalahannya, kan sudah saya bilang berkali-kali saya ingatkan segera bentuk tim terpadu. Tadi katanya ada Perda tahun 2015, apa susahnya merubah Perda. Kalau Perdanya tidak dirubah jangan kasih Anggota DPRD-nya biaya dinas, gitu saja apa susahnya. Karena kemarin sepulang rapat dari sini kami kordinasi dengan Menteri Kehutanan dan seluruh eselon I, paling sulit kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Betul Bapak Didik? Ini ada Bapak Didik saksinya, paling susah.

Terus tadi minta masalah plasma, bagaimana kami mau bantu orang kami saja kebunnya tidak tahu, nama PT-nya apa. Coba bagaimana caranya kami membantu, kalau tidak ada plasma kan sudah jelas melanggar Undang-Undang, kita laporkan kepada aparat yang berwajib. Tapi Cuma tadi tulisannya adalah “yang belum memiliki plasma ada 7 unit, PMA 8 unit, PMDM 59 unit. Apa susahnya walaupun investor asing, kalau tidak memenuhi peraturan yang dibuat Undang-Undang Republik Indonesia, kalau perlu kita usir ya usir. Bukan kita tidak mencari investor tetapi tolong hargai.

Saya tahu Bapak Gubernur dalam tekanan kok, bukan saya tidak tahu. Saya sangat paham sekali, justru disinilah tempat kita membedah, membantu Gubernur menyelesaikan masalah. Teman-teman complain dengan saya Bapak Gubernur, saya kadang malu. Kok Ketua Komisi IV DPR RI memanggil Gubernur dua kali tidak datang, apa dilindungi karena adiknya. Saya bilang ya nanti saja lihat sajalah apa yang akan terjadi. Jadi mau saya itu data itu harus lengkap, permasalahannya adalah bukan hanya di Kalimantan Tengah saja. Termasuk juga mitra kami datanya asal-asalan, begitu di-compare dengan data BPS pasti beda. Kalau mau Pilkada angka kemiskinannya menurun, tapi setelah Pilkada lewat angka kemiskinannya naik, ini data BPS.

Sudahlah kita harus transparan, kalau bicara membantu rakyat segera ajukan RTRWP, apabila untuk kepentingan rakyat. Saya siap badan beserta Anggota Komisi IV DPR RI. Di tempat ini 5 tahun terakhir tidak ada RTRWP yang lolos. Kenapa? Jangan bilang untuk rakyat tapi nyanya untuk korporasi. Kalau untuk rakyat ya kita pasang badan yang penting kita tidak melanggar Undang-Undang, tidak melanggar peraturan.

Dan perlu diingat, saya ingatkan kepada pembantunya Gubernur, tadi apa yang dikatakan Bapak Firman Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pasal 28 “melindungi pelaku pembakalan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, itu sudah melanggar Undang-Undang. “dengan...” nah ini yang paling penting ini, “dengan sengaja melakukan pembiaran dalam

melaksanakan tugas atau lalai dalam melaksanakan tugas setiap pejabat yang berwenang akan dikenakan sanksi hukuman". Jadi silakan saja kalau Kadis ini tidak sayang sama Gubernurnya langgar saja Undang-Undanganya.

Jadi tolong Mbak Ita, nanti kita rapat gabungan dari Gakum, dari Planologi, dan Dirjen Perkebunan. Kita duduk bersama menyelesaikan masalah Kalimantan Tengah ini bagaimana. Saya berharap penyelesaiannya rapat gabungannya kita jadwalkan kalau bisa bulan Maret akhir atau April, karena dengan adanya solusi *insya allah* gubernur bisa dua periode.

Mbak Alien mau ngomong.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Iya, ijin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Tadi yang sudah disampaikan Bapak Kadis untuk juga mengetahui, karena kita kan juga ingin mengetahui yang ilegal dan legal. Tentunya dalam laporan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pasti ada pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit. Disitu pasti tentunya terdaftar perkebunan-perkebunan apa saja yang membayar pajaknya dan diketahui hasil-hasil perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui perusahaan yang legal dan ilegalnya tadi Pimpinan. Jadi itu juga mungkin kita bisa ketahui dimana yang legal dan ilegal.

Biasanya juga Pimpinan, terjadinya pembayaran atau pajak perkebunan atau kawasan hutan itu memang ada di-*under* laporan untuk kepada Pemerintahan Provinsi atau Pemerintah Daerah. Jadi kadang kita tidak ketahui tapi mereka pun yang ilegal itu kadang membayar juga tapi siapa yang mengumpulkan seperti itu.

Itu saja tambahan saya Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Mbak Alien atas tambahannya.

Jadi kita tunggu data, kita undang lagi saudara Gubernur dengan rapat gabungan, karena saya tidak mau bertele-tele. Jangan nanti katanya yang tahu Dirjen Perkebunan, yang tahu Planologi, yang tahu Gakum. Kita undang ketiga-tiganya termasuk saudara Gubernur. Tolong nanti dijadwalkan akhir Maret atau April, karena di bulan Februari ini sampai tanggal 28 kita sudah full rapat anggaran beserta Rapat Kerja.

Terima kasih saudara Gubernur, tidak ada kesimpulan rapat karena kita tidak punya data, dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah*, Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.01 WIB)

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo  
196301221991031001